

DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPERKUAT KOMITMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK Mendukung PROSES PERDAMAIAN AFGHANISTAN

Arief Rachman MD,¹ Marissa Aulia,² Nigin Abdulrab,³ Yulius Purwadi⁴, Mia Dayanti Fajar,⁵ A.A.S.
Dyah Ayunda⁶

¹ Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan, arief.rachman7680@gmail.com

² Asisten Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan, marissa.aulia1605@gmail.com

³ Staff Kedutaan Besar Republik Indonesia di Afghanistan

⁴ Ketua Tim Peneliti Riset Desain PRN IV, purwadi@unpar.ac.id

⁵ Asisten Peneliti Riset Desain PRN IV, dayantimia@yahoo.com

⁶ Asisten Peneliti Riset Desain PRN IV, dyah.ayundanadiaa@gmail.com

ABSTRAK

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan telah menghancurkan kehidupan masyarakat terutama, kaum perempuan dan anak. Tidak sedikit upaya telah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan untuk menyelesaikan konflik demi menciptakan perdamaian. Salah satu upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah Afghanistan ialah meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan. Indonesia yang juga terlibat dalam Komisi Status Perempuan PBB turut mendukung upaya pemerintah Afghanistan. Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa hal tersebut merupakan komitmen internasional Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis diplomasi Indonesia dalam mengupayakan proses perdamaian di Afghanistan melalui penguatan komitmen pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran *soft power* yang dapat menjelaskan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan konsep *soft power currency* dalam menjelaskan sejauh mana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengolahan data *process-tracing*. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik diplomasi Indonesia dalam upaya mendukung proses perdamaian di Afghanistan, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan sesuai pendekatan *soft power currency* yang terdiri dari tiga konsep, yaitu *beauty*, *brilliance*, dan *benignity*.

Kata kunci: Afghanistan, Indonesia, soft power, pemberdayaan perempuan, perdamaian.

ABSTRACT

The prolonged conflict that occurred in Afghanistan has destroyed the lives of the people, especially women and children. The Afghan government has made several attempts to resolve the conflict in order to create peace. One of the efforts made by the Afghan government is to increase women empowerment. Indonesia, which is also involved in the UN Commission on the Status of Women, also supports the efforts of the Afghan government. The Indonesian government realizes that this is also Indonesia's international commitment in maintaining world peace. Therefore, this study analyses Indonesia's diplomacy in pursuing the peace process in Afghanistan by strengthening the commitment to empower women. This study uses soft power concepts in order to explain the use of Indonesia's diplomacy in implementing its foreign policy. Furthermore, this paper also uses the concept of soft power currency in explaining the extent of diplomacy carried out by Indonesia. This study uses qualitative methods with process-tracing data processing techniques. The findings in this study indicate that Indonesia's diplomatic practices in supporting the peace process in Afghanistan, by means of empowering women is consistent with the soft power currency approach, which consists of three concepts, namely beauty, brilliance, and benignity.

Keywords: Afghanistan, Indonesia, soft power, women empowerment, peace.

Pengantar

Konflik yang terjadi di Afghanistan merupakan kumpulan konflik kekerasan dan ekstremisme yang telah berlangsung sejak 1978. Konflik ini telah memperlambat kemajuan pembangunan dan stabilisasi keamanan nasional Afghanistan. Berdasarkan data *The Guardian* pada tahun 2014, Afghanistan menjadi negara kedua rawan konflik dengan skor 3,42 yang berada satu posisi di belakang Suriah.¹ Dalam konflik tersebut beberapa aktor, baik negara maupun non-negara, terlibat di dalamnya, antara lain Arab Saudi, Iran, Taliban, Al-Qaeda, dan juga keterlibatan Amerika Serikat, Pakistan, Rusia, India, dan Tiongkok. Konflik yang terjadi bersifat kompleks dan berkepanjangan sehingga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Afghanistan. Konflik sipil yang telah terjadi di Afghanistan tercatat sejak 1978 hingga saat ini. Upaya damai telah dilakukan pada tahun 2001, dimana Afghanistan menandatangani Perjanjian Bonn yang merupakan perjanjian damai untuk mengakhiri perang saudara. Namun hal tersebut nyatanya tidak menghentikan konflik di Afghanistan yang masih berlangsung hingga saat ini, terbukti dengan stabilitas keamanan dan politik Afghanistan yang masih sangat rendah.

Konflik politik baru muncul dan semakin memanas dengan penundaan pelantikan Presiden Afghanistan yang kontroversial. Pemilihan presiden yang dilaksanakan pada September 2019 tersebut telah menghasilkan Presiden Afghanistan terpilih Ashraf Ghani. Namun, Abdullah Abdullah yang merupakan pihak pesaing tidak menerima hal tersebut dan mengaku sebagai presiden terpilih. Hal tersebut menyebabkan upacara pelantikan presiden terpilih tertunda. Amerika Serikat kemudian mengutus Zalmay Khalilzad untuk menyelesaikan pertikaian di

antara Ghani dan Abdullah melalui jalur perundingan.²

Dalam konstelasi politik Afghanistan, Ghani dan Abdullah memainkan peran penting dalam pemerintahan sebelumnya dengan perjanjian multi-kekuatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat setelah pemilu 2014. Diplomat Barat di Kabul mengesankan bahwa situasi tersebut tidak jelas bagaimana penyelesaiannya. Hingga akhirnya pada 18 Februari 2020, Komisi Independen Pemilihan (KIE) mengumumkan dan mengesahkan bahwa Ghani merupakan presiden terpilih yang memenangkan pemilu tersebut.³

Sederet konflik lainnya masih terus bergulir dengan munculnya pemicu, seperti masalah perbatasan, suku, perbedaan ideologi, hingga kemunculan berbagai aktor baru. Hal tersebut menimbulkan efek muncul dan tenggelam, seperti timbulnya kecurigaan antara dua partai sekutu, perebutan kekuatan, dan demonstrasi sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Konflik ini telah menguntungkan kelompok tertentu yang menginginkan hal tersebut terus terjadi. Dengan demikian, tidak dapat diharapkan akan terjadi perdamaian di Afghanistan.

Konflik berkepanjangan yang terjadi tentu telah menghancurkan kehidupan masyarakat Afghanistan, tidak terkecuali bagi kaum perempuan dan anak. Mereka merupakan korban yang paling merasakan akibat dari kekacauan yang ditimbulkan oleh konflik. Pemerintah Afghanistan sendiri telah mengembangkan dan mempromosikan hak-hak perempuan sebagai bentuk pengakuan adanya kesetaraan gender sejak 2001. Hal tersebut dapat dilihat dari jutaan perempuan yang kembali ke sekolah, memasuki tempat kerja, dan berperan serta berpartisipasi dalam masyarakat sipil. Kemudian pada tahun 2003

¹ I. Khurun'in. 2016. "Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan." *Jurnal Transformasi Global*, Vol. 3, No.1.

² A. H. Mustaqim. (2020, Maret 10). "Konflik Politik Terus Berlanjut, Pelantikan Presiden Afghanistan

Ditunda." Diakses dari [SindoNews.com](https://international.sindonews.com/berita/1551238/43/konflik-politik-terus-berlanjut-pelantikan-presiden-afghanistan-ditunda): <https://international.sindonews.com/berita/1551238/43/konflik-politik-terus-berlanjut-pelantikan-presiden-afghanistan-ditunda> pada 14 September 2020.

³ Ibid.

didirikanlah Kementerian Perempuan Afghanistan (*Ministry of Women's Affairs*, selanjutnya disingkat MOWA).

Meskipun perempuan Afghanistan masih menghadapi tantangan yang signifikan, upaya pemerintah Afghanistan melalui MOWA telah membawa kemajuan besar bagi mereka, terutama dalam pendidikan, partisipasi politik, dan peranan ekonomi yang semakin meningkat. Terdapat beberapa perkembangan konstitusi nasional yang menjamin kesetaraan hak perempuan, seperti adopsi Rencana Nasional Kemajuan Perempuan Afghanistan 2008-2018; Pengesahan Rencana Aksi Nasional untuk Perempuan Afghanistan (*National Action Plan for the Women of Afghanistan*, selanjutnya disingkat NAPWA); dan terakhir adalah undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang merupakan pencapaian terbesar bagi MOWA. Dapat dipahami bahwa semangat pemberdayaan perempuan saat ini menjadi isu kritis di Afghanistan. Pemerintah Afghanistan telah berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan dan berjanji untuk memastikan partisipasi perempuan di semua tingkatan, memberantas diskriminasi terhadap perempuan, dan mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan.

Tidak sedikit upaya telah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan untuk menyelesaikan konflik yang ada dan menciptakan perdamaian di negaranya. Upaya tersebut dilakukan mulai dari pembahasan untuk mendapatkan kata perdamaian hingga penandatanganan perjanjian damai. Namun hingga saat ini, upaya-upaya yang telah dilakukan belum dapat menyelesaikan konflik di Afghanistan. Pada November 2017, muncul harapan baru perdamaian di Afghanistan dengan diadakannya kunjungan *High Peace Council* (HPC) atau *High Peace Council for Afghanistan* ke Indonesia. Ketua HPC secara

terbuka menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik di Afghanistan.⁴

Pesan yang disampaikan oleh Ketua HPC tersebut bukan tanpa alasan, karena Indonesia saat ini menjadi kiblat perdamaian dunia, dimana puncaknya pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan penghargaan *Zhenghe International Peace Award 2019* atas berbagai fenomena keberhasilan Islam di Indonesia dalam membangun dialog antar budaya dan antar komunitas. Hal ini menjadi ciri khas dan menarik perhatian dunia. Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu pemengaruh (*influencer*) perdamaian dunia, khususnya Afghanistan. Indonesia terbukti memiliki komitmen kawasan yang kuat untuk menjaga perdamaian di wilayah negara yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan kepercayaan yang berbeda.

Indonesia yang juga terlibat dalam Komisi Status Perempuan PBB yang merupakan bagian dari *Economic and Social Council* (ECOSOC) turut mendukung upaya pemerintah Afghanistan dalam pemberdayaan perempuan untuk mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk turut meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan melakukan kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan MOWA. Kerja sama antara KPPPA dan MOWA telah dimulai sejak 18 Desember 2013 yang ditandai dengan penandatanganan MoU tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan Indonesia dan Afghanistan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta peran perempuan dalam isu kesehatan gender. Kesepakatan dalam MoU tersebut menjadi dasar pijakan bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul, Afghanistan untuk melaksanakan beberapa kegiatan kerja sama

⁴ A. Waluyo. (2017, November). Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Berharap Peran Indonesia Atasi Konflik di Afghanistan. Diakses dari www.voaindonesia.com:

<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diharapkan-ikut-berperan-atasi-konflik-di-afghanistan/4129788.html> pada September 2020

yang telah disepakati oleh kedua negara. Kerja sama yang telah dilaksanakan di antaranya, yaitu a) kunjungan Menteri KPPPA ke Afghanistan; b) kunjungan Ibu Negara Afghanistan ke Indonesia; c) mengundang *businesswoman* Afghanistan untuk mengikuti *trade expo*, *trade workshop*, dan seminar di Indonesia; d) memberikan beasiswa dan *short course* bagi mahasiswa perempuan Afghanistan untuk belajar di Indonesia; dan e) mengadakan *Women Dialogue* untuk Wanita Afghanistan dan berasosiasi dengan Taliban, yang dihadiri oleh korban perang.

Ada pun salah satu program prioritas KPPPA yang juga menjadi dasar keterlibatan Indonesia dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan di Afghanistan, yaitu “*three ends*” atau tiga akhiri. Program prioritas ini memiliki makna a) akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; b) akhiri perdagangan manusia; dan c) akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Sejauh ini upaya kerja sama yang telah dilakukan KPPPA dengan MOWA adalah pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan melalui keluarga berencana, intervensi ekonomi, dan pelatihan desain busana muslim. Indonesia akan terus mendorong Afghanistan melalui program-program kerja sama melalui pihak ketiga dalam skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) dan berharap pihak Afghanistan juga terus aktif untuk melibatkan perwakilannya.

Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tulisan ini memadukan penggunaan kerangka teori dan konsep dalam menjelaskan diplomasi sebagai salah satu upaya untuk membangun proses perdamaian melalui penguatan komitmen pemberdayaan perempuan. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggunakan pendekatan komunikasi antar budaya. Selain itu, dalam memahami bagaimana upaya diplomasi yang merupakan bagian dari pemanfaatan *soft power*

Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa keterlibatan Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia menjadi sangat penting bagi pelaksanaan komitmen internasional dan politik luar negeri Indonesia. Termasuk dalam permasalahan di Afghanistan, Indonesia memiliki peran penting dalam proses perdamaian. Dalam menjalankan perannya sebagai mediator perdamaian, Indonesia selalu menggunakan pendekatan *soft power* melalui jalur diplomasi dalam menangani berbagai isu, baik regional maupun internasional. Kekuatan militer bukanlah pilihan dalam politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Oleh karena itu, kekuatan *soft power* dan peran Indonesia di lingkungan internasional, khususnya di kawasan, selalu diperhitungkan.

Berdasarkan komitmen pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh Indonesia dan pendekatan *soft power* yang digunakan oleh Indonesia dalam mengupayakan proses perdamaian di Afghanistan, tulisan ini membahas “Bagaimana diplomasi Indonesia dalam mengupayakan proses perdamaian di Afghanistan melalui penguatan komitmen pemberdayaan perempuan?” Dalam melakukan analisis, tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran mata uang kekuatan lunak (*soft power currency*) untuk mendeskripsikan diplomasi dan peran Indonesia dalam memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan dalam proses perdamaian di Afghanistan.

(kekuatan lunak) dilakukan, maka tulisan ini menjelaskannya dengan *soft power currency*.

Diplomasi merupakan salah satu sarana yang digunakan negara untuk melaksanakan kebijakan luar negeri yang dikemas dan diimplementasikan oleh kementerian luar negeri. Pada dasarnya, diplomasi adalah salah satu bentuk kegiatan politik berunsur kekuasaan yang membutuhkan keterampilan dan sumber daya yang baik. Diplomasi tak hanya dijalankan oleh diplomat profesional, tetapi juga oleh pejabat atau orang lain yang diberi kepercayaan

Tabel 1. Perbandingan *Spectrums of Behaviour* dan *Most Likely Resources*

	Hard	Soft
Spectrum of Behaviors	Command ← coercion inducement	agenda setting attraction → Co-opt
Most Likely Resources	force sanctions payments bribes	institutions values culture policies

Sumber: *Soft Power the Means to Success in World Politics*, 2004

dan mandat oleh pemerintah. Tugas diplomatik yang diamanatkan dapat berupa kegiatan lain dalam kanal diplomasi yang berbeda-beda.⁵ Dapat dipahami bahwa diplomasi memungkinkan suatu negara untuk mencapai kepentingan maupun kebijakan luar negeri dalam berbagai bidang tanpa menggunakan unsur kekerasan.

Sejalan dengan hal tersebut, diplomasi tentu dapat dimanfaatkan untuk mendukung penggunaan kekuatan negara dalam upaya membangun proses perdamaian dunia tanpa menggunakan kekerasan. **Perdamaian dunia** sendiri memiliki makna gagasan tentang kebebasan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh bangsa dan negara. Hal ini dapat diraih dengan memenuhi hak asasi manusia dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses teknologi.

Berdasarkan pengertian dan manfaatnya dalam mendukung proses perdamaian dunia, diplomasi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk penggunaan *soft power* yang dimiliki oleh suatu negara. **Soft power** sendiri memiliki makna kemampuan untuk memenuhi kepentingan suatu pihak dengan cara mengajak atau menarik perhatian (persuasif) pihak lainnya daripada menggunakan paksaan atau pembayaran.⁶

Dapat dikatakan *soft power* merupakan alternatif dari pemanfaatan kekuatan negara yang bersifat keras atau disebut juga dengan *hard power*, seperti embargo ekonomi dan ancaman militer. Terdapat perbedaan pendekatan perilaku dan sifat sumber daya di antara *soft power* dan *hard power* (lihat **Tabel 1**). Pendekatan perilaku yang digunakan dalam *hard power* ialah berupa paksaan atau bujukan yang disebut juga dengan *command power*. *Hard power* cenderung memanfaatkan kekuatan militer, pajak, pembayaran, dan suap sebagai bentuk sumber daya kekuatannya. Sementara pendekatan perilaku *soft power* menggunakan *co-opt* yang bertujuan memanipulasi agenda politik dan menarik perhatian pihak lain. Oleh sebab itu, *soft power* cenderung menggunakan nilai, budaya, dan kebijakan yang ada dalam sebuah institusi sebagai sumber daya kekuatannya.

Untuk memahami penggunaannya, Alexander Vuving (2009) menjelaskan lebih lanjut mengenai tiga faktor yang mengkonstitusi *soft power* melalui konsep **soft power currency**.⁷ Hal pertama yaitu *beauty* yang merupakan hubungan antara sifat dari sebuah aktor yang memiliki nilai, ide, serta visi. Hal tersebut mengacu pada kecenderungan manusia untuk menjalin kebersamaan

⁵ G. Berridge. 2010. *Diplomacy Theory and Practice*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

⁶ J. S. Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. United States: Public Affairs.

⁷ A. L. Vuving. 2009. "How Soft Power Works". Paper presented at the panel "Soft Power and Smart Power". American Political Science Association annual meeting. Toronto.

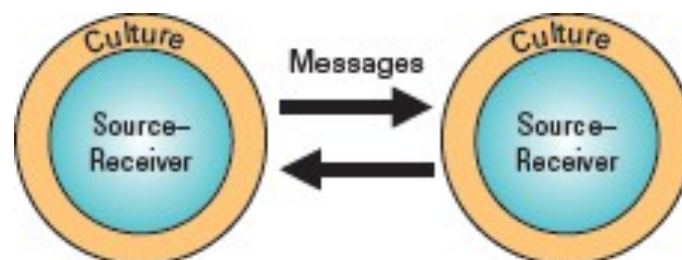
berdasarkan visi dan misi yang sama. Apabila sebuah negara berhasil menunjukkan bahwa sebuah ide patut untuk diperjuangkan dengan rasa percaya diri, maka negara lain juga akan terpenggil untuk bersama-sama memperjuangkan ide tersebut. Kemudian faktor selanjutnya ialah *brilliance* yang mengacu pada kinerja dan hasil yang telah dicapai dalam melakukan sesuatu. *Brilliance* dapat menghasilkan rasa kekaguman dari orang lain atas kesuksesan yang telah dicapai. Faktor terakhir ialah *benignity* yang mengacu pada sikap positif yang direfleksikan oleh seseorang dalam memperlakukan orang lain. Hal ini bekerja berdasarkan kecenderungan altruisme timbal balik yang ada pada sebagian besar organisme. Pada diri manusia, *benignity* berupa rasa syukur dan simpati dapat menghasilkan *soft power*.

Penggunaan *soft power* hanya dapat dilakukan jika masing-masing pihak mengakui kekuatan, upaya, dan memiliki harapan yang sama dalam rangka memperkuat tekad dalam melaksanakan dan mencapai kepentingan bersama.⁸ Kemampuan ini juga digunakan oleh para pejabat untuk melaksanakan kegiatan lain, seperti mengumpulkan data dan informasi, menegaskan maksud dan tujuan, serta membangun relasi baik dengan negara lain.⁹ Oleh sebab itu, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pejabat/diplomat dirancang sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian pihak lain untuk mendukung kepentingan dan mempromosikan kebijakan luar negerinya.

Perbedaan nilai dan budaya Indonesia dan Afghanistan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah Indonesia dalam merancang pendekatan komunikasi yang sesuai. Oleh sebab itu dibutuhkan pendekatan berdasarkan **komunikasi antar budaya** untuk dapat menjembatani perbedaan tersebut. Menurut DeVito dalam bukunya yang berjudul "*Human Communication – The Basic Course*," komunikasi antar budaya merupakan komunikasi yang terjadi di antara pihak yang memiliki perbedaan, baik dalam keyakinan, norma, maupun perilaku.¹⁰ Ia mengidentifikasi tipe komunikasi antar budaya yang dilakukan antara dua atau lebih orang yang memiliki perbedaan kebangsaan, ras, agama, maupun etnis ke dalam sebuah model berikut.

Lingkaran besar pada model **Gambar 1** melambangkan lingkup budaya tertentu yang meliputi komunikator/individu di dalamnya (lingkaran kecil).¹¹ Komunikator tersebut menjadi sumber sekaligus penerima pesan yang disampaikan. Melalui model tersebut, DeVito menjelaskan bahwa latar belakang budaya komunikator mempengaruhi dan menjadikan setiap mereka memiliki gaya penyampaian pesan dan juga cara pandang yang berbeda dalam menerima pesan. Perbedaan latar belakang budaya dalam komunikasi akan melalui proses enkulturasi maupun akulturasi, tujuannya agar setiap pihak dapat saling memahami sehingga pesan dapat tersampaikan.

Gambar 1. Model Komunikasi Antar Budaya



Sumber: *Human Communication – The Basic Course*, 2015

⁸ J. S. Nye, op.cit.

⁹ G. Berridge, op.cit.

¹⁰ J. A. DeVito. 2015. *Human communication: The basic course*. Boston: Allyn and Bacon.

¹¹ Ibid.

Pendekatan komunikasi antar budaya tersebut dapat membantu Indonesia dalam menerapkan **komitmen pemberdayaan perempuan** dalam mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Melalui komunikasi antar budaya, penerapan pemberdayaan perempuan disesuaikan dengan cara pandang, tradisi budaya, maupun keyakinan yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya, praktik baik pemberdayaan perempuan yang diperoleh dari Indonesia akan disesuaikan kembali ketika hendak diterapkan bagi perempuan di Afghanistan. Peran dan keterlibatan perempuan dalam perdamaian dunia menjadi hal penting yang dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak asasi perempuan dalam berbagai bidang potensi yang dimiliki. Diharapkan upaya ini dapat mengakhiri konflik-konflik yang terjadi, sebab perempuan telah banyak menjadi korban yang paling dirugikan dalam situasi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode paradigma penelitian kualitatif yang dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman makna pada sebuah fenomena, aktivitas, dan proses sosial.¹² Metode ini sesuai untuk dapat mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari (1) observasi, (2) *in-dept interview*, dan (3) pencarian dokumen arsip. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif interpretatif, melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding. Untuk memahami diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan dalam mengupayakan proses perdamaian di Afghanistan, dibutuhkan studi lebih lanjut terkait urutan terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan metode penelitian *process-tracing*. Dari data yang terkumpul kemudian disusun sesuai dengan waktu terjadinya kegiatan untuk memahami sejauh mana keterlibatan Indonesia komitmen tersebut.

Penelitian ini dilakukan secara deduktif menggunakan teori untuk memprediksi variabel dalam suatu kasus dan menguji prediksi tersebut.

Analisis

Kehadiran peranan perempuan menjadi penting di berbagai bidang, termasuk dalam upaya proses perdamaian. Perempuan sudah mendapatkan posisi yang setara dengan kaum lelaki di beberapa negara maju, namun di beberapa negara berkembang peranan perempuan masih mendapatkan penolakan dari masyarakat, meskipun kebijakan negara tersebut memberikan peluang dan perlindungan terhadap perempuan. Peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sangat menarik untuk dicermati. Melalui pemberdayaan perempuan sudah banyak dilibatkan untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, analisis dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu a) Peran Penting Perempuan dalam Mendukung Proses Perdamaian di Afghanistan; b) Komitmen Indonesia dalam Memperkuat Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan; dan c) Diplomasi Indonesia dalam Konsep *Soft Power Currency*.

a. Peran Penting Perempuan dalam Mendukung Proses Perdamaian di Afghanistan

Pemberdayaan perempuan menjadi isu kritis bagi pemerintahan Afghanistan di tengah situasi konflik. Terbatasnya ruang gerak sosial perempuan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Implementasi terhadap budaya patriarki yang masih cukup tinggi di tengah masyarakat Afghanistan, memberikan dampak terhadap rendahnya penegakkan hak sosial dan ekonomi perempuan, seperti hak atas warisan, tanah dan kendali atas penghasilan. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan lapangan pekerjaan, tidak banyak perempuan Afghanistan memiliki

¹² Umar Suryadi Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kesempatan untuk bekerja di luar rumah, terutama di daerah pedesaan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan daripada laki-laki, serta permasalahan buta huruf.

Dalam konteks negara Afghanistan, pemberdayaan perempuan dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada para perempuan atas hak yang dapat mereka miliki, diantaranya perempuan mampu mengambil keputusan mereka sendiri dan hak atas kebebasan berpendapat. Hal ini perlu dilakukan bagi perempuan Afghanistan untuk tidak selalu bergantung kepada peran laki-laki. Peran perempuan tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup keluarga dan pekerjaan rumah saja, namun perempuan juga berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan yang setara.

Hak-hak perempuan Afghanistan telah berkembang secara signifikan sejak tahun 2001. Hal ini ditandai dengan terbukanya kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Pada tahun 2003, pemerintah membentuk MOWA sebagai wujud dari komitmen dalam penanggulangan isu pemberdayaan perempuan dan promosi kesetaraan gender. MOWA memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan perempuan Afghanistan dalam bidang pendidikan, partisipasi politik, dan peranan ekonomi. Dalam kerangka kebijakan publik, MOWA membentuk konstitusi nasional yang dapat menjamin kesetaraan hak perempuan, pengadopsian Rencana Nasional Kemajuan Perempuan Afghanistan 2008 – 2019, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dan pengesahan NAPWA di tahun 2008. NAPWA merupakan rencana multi-sektor selama 10 tahun yang menekankan kepada: pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, partisipasi politik, pertumbuhan organisasi masyarakat sipil, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Terbentuknya MOWA mampu meningkatkan perkembangan atas partisipasi aktif perempuan Afghanistan. Sebanyak lebih

dari dua juta anak perempuan (yaitu 35% dari total populasi siswa) kembali menghadiri sekolah – sekolah publik yang berada dalam kekuasaan Taliban. Dalam hal partisipasi politik, meningkatnya antusiasme perempuan ditandai dengan keterlibatan 400 perempuan dalam Pemilihan Umum Parlemen Afghanistan tahun 2010. Peran perempuan semakin penting ketika untuk pertama kalinya pemerintah melibatkan perempuan sebagai pengamat pemilu di seluruh provinsi di Afghanistan. Hal ini membawa perempuan mendapatkan posisi tertinggi dalam keanggotaan Parlemen Afghanistan, yaitu sebanyak 18% dalam Majelis Tinggi Parlemen dan 28% dalam Majelis Rendah Parlemen, termasuk empat Menteri perempuan dan sembilan wakil menteri perempuan. Selain itu, sekitar 20% pekerjaan dalam sektor publik beranggotakan perempuan, yang terdiri dari empat duta besar perempuan dan seorang gubernur perempuan. Sedangkan, dalam lembaga penegakan hukum Afghanistan terdapat 240 hakim perempuan.

Pemerintah Afghanistan menyadari bahwa pentingnya peran perempuan dapat membawa perubahan di tengah masyarakat, baik dalam hal politik, sosial, dan ekonomi. Selain dominasi peran laki-laki, perempuan dapat terlibat dalam pekerjaan berbayar yang diyakini mampu membantu kondisi perekonomian keluarga. Tentunya dengan harapan dapat menekan tingkat kemiskinan masyarakat Afghanistan. Pada tanggal 12 Maret 2017, Ibu Negara Afghanistan, Rula Ghani, menunjukkan dukungannya terhadap peran penting perempuan Afghanistan dengan meresmikan *Afghanistan Women Chamber of Commerce and Industries* (AWCCI). Terbentuknya AWCCI sebagai wadah untuk mempromosikan hasil kerajinan tangan komunitas perempuan Afghanistan kepada dunia internasional. Sebanyak 850 perempuan terdaftar menjadi anggota AWCCI yang berasal dari seluruh provinsi Afghanistan. AWCCI merupakan wujud nyata bagi perempuan Afghanistan untuk memulai kewirausahaan mandiri (*lihat tabel pada lampiran*).

Diyakini bahwa kebangkitan perempuan Afghanistan mampu membentuk kekuatan baru dalam pembangunan negara Afghanistan yang adil, damai dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Millenium yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu pada tujuan kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua, baik untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam tujuan ketiga, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan kedua tujuan tersebut dapat menjadi kunci bagi Afghanistan untuk dapat mengurangi potensi konflik antar etnik, terutama pengaruh Taliban dan ekstremisme, dan mempromosikan sikap demokrasi dan perdamaian di Afghanistan.

b. Komitmen Indonesia dalam Memperkuat Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan

Tujuan dan komitmen internasional negara Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 paragraf keempat alinea kedua, yaitu:

*“... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”*¹³

Berdasarkan tujuan tersebut, komitmen Indonesia untuk turut serta menjaga perdamaian dunia dilakukan melalui partisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Dalam pidato Presiden RI Joko Widodo di Afghanistan menyatakan bahwa:

“Tanpa perdamaian tidak akan ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, perdamaian tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, ketika kita bekerja sama untuk membangun perdamaian, kerjasama ekonomi harus ditingkatkan secara paralel.”

Dalam mewujudkan upaya perdamaian dan pembangunan di Afghanistan perlu adanya keselarasan hubungan sosial, politik, ekonomi. Peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di Afghanistan dilakukan melalui pendekatan diplomasi *soft power* yang mengintegrasikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan.

Hubungan diplomatik Afghanistan dan Indonesia dimulai pada 24 April 1955, setelah kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan di Bandung dan membawa hubungan historis kedua negara selama 65 tahun. Dalam kunjungan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada 12 September 2020 ke Afghanistan, menyatakan bahwa Indonesia sangat memperhatikan keberlangsungan proses perdamaian Afghanistan dan Indonesia akan tetap berkomitmen dalam peningkatan pemberdayaan perempuan Afghanistan. Proses menuju perdamaian dan stabilitas di Afghanistan tidak hanya semata menjadi kepentingan Afghanistan, namun juga untuk kepentingan Indonesia, kawasan, dan dunia.¹⁴

Dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan, kerjasama Indonesia dan Afghanistan dimulai pada tahun 2017. Kunjungan Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani ke Indonesia pada 5 April 2017 yang disambut oleh Presiden RI Joko Widodo menghasilkan kesepakatan kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan dan perlindungan gender. Hal ini memperkuat kerja sama kedua negara secara khusus atas pendidikan dan pemberdayaan perempuan, yang tercantum dalam bagian kesepakatan kerjasama, yaitu 1) Pendidikan berupa pelatihan kemampuan khusus maupun pendidikan formal berjenjang; 2) Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi termasuk peningkatan akses pasar produk yang dihasilkan industri kecil milik perempuan; 3) Peningkatan kapasitas

¹³ Naskah UUD RI 1945

¹⁴ Retno LP Marsudi, Toward long-lasting peace and stability in Afghanistan, Jakarta Post 05/06/2020,

<https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/05/toward-long-lasting-peace-and-stability-in-afghanistan.html> diakses pada tanggal 21 November 2020.

perempuan untuk lebih berperan dalam proses perdamaian, serta meliputi upaya mendorong pertukaran ulama perempuan dan penguatan kapasitas ulama perempuan dan penguatan kapasitas ulama perempuan di Afghanistan; 4) Perlindungan perempuan dan anak. Sebagai hasil dari tindak lanjut kesepakatan tersebut, Menteri PPPA Yohana Yembise, berkunjung ke Afghanistan untuk menjadi pembicara utama dalam *Symposium on the Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace* (**lihat tabel pada lampiran**).

Duta Besar RI untuk Afghanistan, Arief Rachman MD, memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pemberdayaan perempuan dengan mengadakan pertemuan langsung bersama para perempuan Wakil Gubernur Provinsi Kabul, yaitu Provinsi Nangarhar dan Herat. Terdapat tiga topik utama dalam pertemuan tersebut, yaitu 1) Peran perempuan dalam perkembangan dan kemajuan Indonesia; 2) Peran aktif perempuan Muslim di negara-negara Muslim; 3) Peran perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian. Ketiga topik tersebut menjadi bahan diskusi untuk mengkaji sejauh mana Indonesia dan Afghanistan dapat saling mendukung dan menunjukkan praktik baik Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Afghanistan.

Diplomasi Indonesia melalui pemberdayaan perempuan di Afghanistan dilakukan dengan rangkaian kunjungan dan keterlibatan aktif dalam inisiasi program pemberdayaan perempuan bersama Pemerintah maupun masyarakat sipil Afghanistan. Rangkaian kerangka kerja terkait dengan keterlibatan peran perempuan terdiri dari beberapa bidang kerjasama, yaitu ekonomi, keagamaan, pendidikan dan penelitian, serta konsolidasi demokrasi.

Dalam mendukung kegiatan perekonomian perempuan, Indonesia berpartisipasi dalam pengiriman delegasi

Business Women Afghanistan yang tergabung dalam AWCCI dan pelatihan untuk perempuan Afghanistan terkait dengan prosedur ekspor dan impor di KBRI Kabul, Afghanistan dalam rangka upaya meningkatkan UMKM Afghanistan. Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar RI untuk Afghanistan, H.E. Arief Rachman memberikan dukungan kepada para pengusaha perempuan di Afghanistan dengan menghadiri Konferensi *the 2nd International Women's Economic Forum and Exploration of Solution*, pada tahun 2018 di Kabul, Afghanistan. Dalam konferensi tersebut membahas tentang masa depan perempuan Afghanistan, terutama peran pengusaha perempuan dalam pembangunan Afghanistan. Keutamaan bidang usaha perempuan Afghanistan terletak pada *saffron*, buah-buahan kering (*dried fruits*), kulit dan batu permata. Selain itu juga, terdapat produksi industri rumahan seperti *rose oil*. Namun, situasi konflik memberikan dampak yang signifikan terhadap pengusaha dan pengrajin untuk memasarkan produknya, yang disertai dengan rendahnya kunjungan turis ke Afghanistan (**lihat tabel pada lampiran**).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memberikan dukungan terbesar terhadap perdamaian Afghanistan melalui peran ulama dan pemberdayaan perempuan. Indonesia meyakini bahwa pentingnya peran ulama dalam mengedepankan nilai perdamaian dapat mewujudkan perdamaian yang abadi di Afghanistan.¹⁵ Salah satu peran organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) bersama para Ulama Indonesia menjadi model bagi para perempuan Afghanistan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat Afghanistan. Hal ini terwujud dengan diselenggarakannya Konferensi Nasional Pertama Ulama Wanita Indonesia bersama *Afghan Woman*

¹⁵ Retno LP Marsudi, "Toward long-lasting peace and stability in Afghanistan", Jakarta Post 05/06/2020, <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/05/to>

ward-long-lasting-peace-and-stability-in-afghanistan.html diakses pada tanggal 21 November 2020.

Organization for Peace and Freedom (AWPFO) (lihat tabel pada lampiran).

Konferensi tahunan Nahdlatul Ulama Afghanistan (NUA) dilaksanakan rutin setiap tahunnya di Kabul, Afghanistan. Konferensi ini dihadiri oleh ulama laki-laki dan perempuan yang berasal dari provinsi Afghanistan dan perwakilan Kedutaan Besar Indonesia. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk memberikan dukungan penuh atas kerja sama peran Indonesia, NUA dan ulama dalam proses perdamaian, rekonsiliasi, dan pembangunan di Afghanistan. Selain itu, terdapat program pendidikan Islam melalui pertukaran pelajar perempuan dalam acara *Short Course on Introduction to Islam in Indonesia*. Kegiatan ini merupakan pendidikan dan pelatihan pendalaman agama Islam, kebudayaan, kerukunan, keberagaman, toleransi beragama di Indonesia yang diberikan kepada 80 pelajar Afghanistan di Sukabumi, Jawa Barat, yang berkerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus 2018, pendidikan dan latihan secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Presiden (*lihat tabel pada lampiran*).

Dengan stereotipe dan praktik sosial masyarakat Afghanistan yang masih mengesampingkan peran perempuan, pemerintah Afghanistan berupaya untuk memberikan pengetahuan lebih terkait dengan peran perempuan. Dalam mendukung hal tersebut, Indonesia berpartisipasi dalam *Academic Symposium "Gender, Beyond the Limits"* di American University of Afghanistan (AUAF) pada tahun 2018. Simposium ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai gender, pemberdayaan perempuan dan penghapusan kekerasan perempuan. Selain itu, para akademisi, peneliti, ahli kebijakan public, dan lembaga masyarakat turut serta hadir untuk dapat memberikan kontribusi dan akses penelitian-penelitian terkait dengan gender di Afghanistan. Keterbukaan terhadap hasil penelitian tersebut diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat Afghanistan

terhadap pentingnya peran perempuan (*lihat tabel pada lampiran*).

Sebagai bentuk dukungan pemerintah Indonesia terhadap Afghanistan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses perdamaian, Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Utusan Khusus Wakil Presiden, Abdul Hamid Awaludin pada tahun 2019 melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan untuk bertemu dengan Ketua *Independent Election Commission (IEC)*. Pertemuan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perihal proses Pemilihan Umum. Program ini dilanjutkan kembali dengan kunjungan balasan dari *IEC* dan *Independent Electoral Compliant Commission (IECC)* Afghanistan ke Indonesia untuk melihat pelaksanaan *capacity building* dalam pemilu. Selain itu, delegasi Afghanistan juga turut serta dalam program *Election Visit* yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia (*lihat tabel pada lampiran*).

Serangkaian upaya diplomasi Indonesia dalam mendukung perdamaian Afghanistan dengan fokus pemberdayaan perempuan mengarah kepada pembentukan *Afghanistan Indonesia Women Solidarity (AISWN)* yang diresmikan di Kabul, Afghanistan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada 1 Maret 2020. Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI Retno Marsudi menerima medali kehormatan 'Malalai' yang diberikan oleh Presiden Afghanistan, Asraf Ghani. Hal ini menjadi bukti atas keberhasilan Indonesia atas upaya implementasi pemberdayaan perempuan di Afghanistan dan Indonesia sebagai agen perdamaian Afghanistan (*lihat tabel pada lampiran*).

c. Diplomasi Indonesia dalam Konsep *Soft Power Currency*

Berikut ini adalah rangkaian praktik diplomasi Indonesia yang dapat dipahami dan diterapkan oleh Afghanistan berdasarkan tiga konsep *soft power currency*.

1) *Beauty*

Konsep *beauty* merupakan landasan dari bentuk *soft power* yang merepresentasikan ide, nilai, visi dan misi. Hal ini mengarah kepada kecenderungan negara untuk menjalin kerjasama berdasarkan kesamaan ide, tujuan, penyebab dan visi yang dapat menjadi inspirasi atau bahan pembelajaran oleh pihak negara lainnya. Terdapat empat indikator dari konsep *beauty* yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya perdamaian di Afghanistan.

Pertama, Kesamaan Ide. Hal ini terwujud dengan adanya kegiatan kunjungan secara bergantian oleh tokoh-tokoh perempuan kedua negara, yaitu kunjungan Ibu Negara Indonesia dan Ibu Negara Afghanistan, Menteri Luar Negeri RI, Menteri PPPA Indonesia dan Menteri Informasi dan Kebudayaan Afghanistan. Kunjungan tersebut merupakan upaya dalam membangun suasana perdamaian di Afghanistan dengan menekankan pentingnya peran perempuan. Selain itu, kunjungan antar negara juga menjadi bentuk penguatan komitmen internasional antara Indonesia dan Afghanistan. Kemudian, terdapat dialog antar negara yang dilakukan oleh beberapa tokoh perempuan dalam bidang keagamaan dan pertukaran wakil perempuan Afghanistan dalam bidang bisnis, kesehatan perempuan seperti profesi bidan, pendidikan kedokteran untuk perempuan, pelayanan rumah sakit, dan pendidikan melalui kegiatan kunjungan ke sekolah atau madrasah, serta universitas (*lihat tabel pada lampiran*).

Kesamaan ide lain yang dapat ditunjukkan oleh Indonesia kepada Afghanistan adalah upaya mengutamakan *win-win solution* sebagai penyelesaian konflik melalui pendekatan *soft power*, salah satunya adalah pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk dapat membentuk komunikasi terkait dengan

pencarian solusi penyebab dari konflik. Seperti yang terjadi pada konflik di Aceh, Indonesia, dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pihak yang berkonflik, sehingga penyebab konflik dapat teratasi dan menghasilkan kesepakatan perdamaian. Selain itu, keterlibatan pemuka agama dan organisasi tertentu, seperti NU dan Muhammadiyah yang dapat menerima aspirasi dan keluhan masyarakat tanpa adanya ancaman dan kekerasan.

Praktik baik Indonesia dapat dijadikan sebagai model bagi Afghanistan dalam menangani konflik, seperti melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat setempat Afghanistan. Dengan demikian, penyelesaian masalah dapat dilakukan tanpa adanya kekerasan atau perang yang dapat merugikan banyak pihak. Indonesia merupakan negara multikultural yang tidak dapat terhindar dari konflik. Namun, dalam penyelesaian konflik, Indonesia mengutamakan konsep *soft power* dalam proses perdamaian. Selain itu, keterlibatan peran perempuan sangat penting dalam mempengaruhi laki-laki dalam menghindari kekerasan dalam penyelesaian konflik.

Kedua, Kesamaan Tujuan. Dalam rangka mewujudkan kesamaan tujuan, Indonesia telah melakukan kerjasama bilateral selama 65 tahun bersama Afghanistan. Bukan hanya berdasarkan hubungan sejarah, namun juga dilatarbelakangi oleh kuatnya rasa persaudaraan atas agama Islam. Presiden Afghanistan, Asraf Ghani mengungkapkan bahwa adanya kesamaan tujuan yang ingin diraih bersama dengan melihat kemajuan Indonesia dalam bidang konsolidasi demokrasi, stabilitas keamanan dan politik, serta nilai Islam yang moderat, harmonis, dan mengedepankan toleransi di tengah perbedaan. Hal ini telah diwujudkan dalam bentuk program-program kerjasama antara

pemerintah Indonesia dan Afghanistan, seperti pertukaran informasi terkait dengan pengalaman Pemilihan Umum di Indonesia, pendidikan dan penelitian tentang gender dalam symposium akademik, peranan KBRI Indonesia di Afghanistan dan terbentuknya AISWN. Indonesia dan Afghanistan sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, meyakini bahwa melalui Islam, perdamaian dapat terjadi atas cinta kasih dan damai. Dengan adanya peran ulama, kerjasama organisasi Islam, dan program pelajar perempuan Afghanistan di Indonesia, seperti dalam kegiatan *Short Course on Introduction to Islam in Indonesia*, dapat memberikan pertukaran informasi dan budaya, khususnya terkait dengan kerukunan dalam keberagaman dan toleransi beragama (*lihat tabel pada lampiran*).

Selain itu, kesamaan tujuan lain yang dimiliki oleh Indonesia dan Afghanistan, yaitu kedua negara sama-sama ingin mempertahankan wilayahnya. Hal ini terlihat dalam upaya Indonesia mempertahankan Timor Leste, yang dimana sebelumnya Timor Leste menuntut referendum pelepasan wilayah dari Indonesia. Dalam penyelesaian masalah tersebut, Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi dengan mengadakan pertemuan dengan pemerintah negara bagian, masyarakat lokal, dan PBB untuk membahas dan mempertimbangkan pendapat rakyat Timor Leste. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik diwarnai oleh tindakan kekerasan dan kontak senjata, namun Indonesia kembali melakukan diskusi sebagai solusi atas penyelesaian konflik. Hal ini menghasilkan lepasnya Timor Leste dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Indonesia telah berhasil menyelesaikan beberapa konflik secara

damai dan mampu mempertahankan wilayahnya. Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Afghanistan dalam menyelesaikan proses rekonsiliasi perdamaian.

Ketiga, kesamaan penyebab konflik.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya kesamaan penyebab konflik yang terjadi di Afghanistan dan Indonesia, serta penyelesaian konflik yang telah berhasil dilakukan oleh Indonesia sebagai model dalam penyelesaian konflik Afghanistan. Faktor agama, menjadi salah faktor kesamaan penyebab konflik. Ketegangan yang terjadi di Aceh berasal dari perbedaan penerapan budaya dan agama Islam di beberapa wilayah Aceh. Dalam mengatasi konflik tersebut, Indonesia melakukan dialog bersama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menghasilkan kesepakatan damai. Untuk memperkuat perdamaian di Aceh, pemerintah Indonesia mengembangkan kapasitas pembangunan daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat Aceh dan mengantisipasi terjadinya konflik baru. Hal ini sejalan dengan harapan rakyat Aceh dalam memaknai inti perdamaian dan untuk terus berkembang menjadi daerah yang lebih baik dan sejahtera.¹⁶ Dengan adanya latar belakang kesamaan penyebab konflik pada kedua negara, tentunya dengan penyelesaian konflik yang baik yang dilakukan oleh Indonesia dapat menjadi model bagi Afghanistan.

Keempat, Kesamaan Visi. Indonesia dan Afghanistan memiliki visi yang sama, yaitu mengutamakan *soft power* dalam segala bentuk penyelesaian konflik. Oleh karena itu, Afghanistan dapat melihat peran Indonesia dalam mengimplementasikan visi negara dengan dalam konsep *soft power*. Pertama, Indonesia memiliki komitmen untuk

¹⁶ N. Nashrullah. (2019, Juli 24). "Perdamaian di Aceh Bisa Jadi Model Penyelesaian Konflik." Diakses melalui <https://nasional.republika.co.id/berita/pv516m320/perdam>

aian-di-aceh-bisa-jadi-model-penyelesaian-konflik pada 14 September 2020.

berpartisipasi secara aktif dalam perdamaian dunia, yang telah ditetapkan dalam UUD RI 1945, paragraf 4, alinea 2. Hal ini terwujud dengan diplomasi aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik, baik sebagai mediator, fasilitator, dan negosiator dalam konflik internasional. Kedua, pencapaian tujuan Indonesia dalam mensejahterakan rakyat, dengan terus melaksanakan pembangunan masyarakat secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah negara.

Berdasarkan pernyataan kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Afghanistan, yaitu Indonesia dan Afghanistan menyepakati bahwa dalam mewujudkan upaya perdamaian dan pembangunan di Afghanistan perlu adanya keselarasan hubungan sosial, politik, ekonomi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat bahwa kesejahteraan rakyat dapat menjadi salah satu faktor terjadinya konflik. Tujuan ini diimplementasikan oleh Indonesia dalam aktivitas diplomasinya bersama Afghanistan dalam memajukan sector perekonomian tingkat menengah sebagai upaya kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peran perempuan, seperti partisipasi Indonesia dalam pengiriman *Business Women Afghanistan* untuk meningkatkan kemampuan dan kreatifitas para pengusaha perempuan dan Pelatihan Pelatihan Prosedur Ekspor Impor di KBRI Kabul untuk 30 wiraswasta Afghanistan (*lihat tabel pada lampiran*).

2) *Brilliance*

Konsep *brilliance* merupakan hasil daripada kinerja negara yang telah dicapai dalam melakukan sesuatu. Sehingga, mendapatkan apresiasi dari negara lain atas kesuksesan dari kinerja yang telah dicapai. Negara lain dapat menjadikannya sebagai role model dalam upaya pembangunan negara. Untuk melihat peran diplomasi Indonesia dalam konsep *brilliance*, terdapat

dua indikator yang saling mendukung, yaitu kesuksesan dan kemampuan.

Pertama, Kesuksesan. Indonesia mampu menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan pendekatan *soft power* sebagai bentuk upaya dalam pembangunan perdamaian. Komitmen Indonesia terkait dengan pemberdayaan perempuan di Afghanistan dapat menghasilkan terbentuknya AISWN di Kabul pada tahun 2020, yang beranggotakan perempuan Afghanistan dan Indonesia. Selain itu, keberhasilan diplomasi Indonesia dalam pemberdayaan perempuan dan agen perdamaian di Afghanistan ditunjukkan dengan pemberian medali kehormatan 'Malalai' oleh Presiden Afghanistan, Asraf Ghani kepada Menlu RI, Retno Marsudi.

Kedua, Kemampuan. Berdasarkan uraian keberhasilan yang telah dicapai, Indonesia telah menjadi *role model* bagi negara-negara yang berada dalam proses pembangunan perdamaian, khususnya Afghanistan. Indonesia mampu membuktikan komitmennya dalam proses perdamaian dalam bentuk pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Melalui serangkaian kunjungan secara aktif, dialog dan program pembangunan kedua negara, Indonesia mampu menyebarkan nilai – nilai positif dan praktik baiknya kepada Afghanistan. Selain itu, kemampuan Indonesia dalam penyelesaian konflik secara damai, dapat diterapkan oleh Afghanistan melalui diplomasi, dialog, dan negosiasi secara aktif yang melibatkan masyarakat lokal, tokoh, dan pemerintah setempat. Dalam penyelesaian konflik, Indonesia juga mampu memelihara keberlangsungan perdamaian dengan melakukan pembangunan ekonomi dalam negeri, untuk mensejahterakan masyarakat demi terciptanya perdamaian yang abadi.

3) *Benignity*

Konsep *benignity* menjelaskan perilaku positif yang ditunjukkan oleh negara yang

dapat disertai dengan peran aktif, seperti melakukan pendampingan. Sikap positif Indonesia terhadap Afghanistan mampu membawa kerjasama bilateral kedua negara selama 65 tahun. Indonesia juga telah berkomitmen penuh untuk mendukung perdamaian di Afghanistan melalui pemberdayaan perempuan. Situasi dalam negeri Afghanistan tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk terus melakukan diplomasi. Hal ini terbukti dengan kehadiran Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara RI di tengah situasi politik dan keamanan Afghanistan yang tidak stabil. Kunjungan tersebut menjadi kunjungan Presiden RI yang kedua kalinya setelah Presiden RI Soekarno setelah 56 tahun yang lalu.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah Indonesia terhadap pembangunan perdamaian yang terintegrasi dengan pembangunan politik, ekonomi dan sosial Afghanistan, Indonesia memberikan peningkatan kapasitas dalam bidang sumber daya mineral. Pada tahun 2019, Utusan Khusus Wakil Presiden RI, Hamid Awaluddin dengan Menteri Pertambangan Afghanistan, Nargis Nehan di Kabul mengadakan pertemuan untuk membahas kesiapan kedua negara dalam memberikan pelatihan dalam bidang minyak dan gas, serta keikutsertaan perempuan dalam pelatihan tersebut. Selain itu, dalam peningkatan sumber daya manusia, Indonesia telah memberikan beasiswa kepada 100 mahasiswa Afghanistan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi Indonesia (*lihat tabel pada lampiran*). Kemudian dalam bidang kesehatan, Indonesia dan Afghanistan telah mendirikan Klinik Persahabatan Indonesia – Afghanistan yang dapat menjadi rujukan kesehatan di 5 daerah Afghanistan. Faktor keagamaan menjadi salah satu faktor terkuat kerjasama kedua negara. Hal ini ditandai dengan, Indonesia telah membangun *Indonesia Islamic Center*(IIC)

yang juga dapat berfungsi sebagai Madrasah laki-laki dan perempuan di Afghanistan.

Peran Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB, memberikan dampak positif bagi Afghanistan. Dalam kepemimpinan Indonesia, DK PBB berhasil melaksanakan 50 kegiatan praktik baik hingga Agustus 2020. Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan *High-Level Open Debate* sebanyak dua kali yang dipimpin oleh Menlu RI Retno Marsudi dengan topik pembangunan perdamaian dalam masa pandemi, serta terorisme dan kejahatan terorganisir. Hal ini membawa perhatian Indonesia kepada Afghanistan terkait dengan usulan untuk melanjutkan penugasan Misi Bantuan PBB di Afghanistan (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan/UNAMA*) dengan perpanjangan waktu selama 1 tahun.

Berdasarkan tiga konsep *soft power currency* beserta indikator yang terkait, Indonesia berhasil melakukan diplomasinya di Afghanistan yang disertai dengan mempromosikan model praktik baik. Rangkaian pencapaian Indonesia dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi Afghanistan dalam upaya proses pembangunan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia, melalui penggunaan *soft power* yang dimiliki, akan secara konsisten menjaga dan mendukung komitmen pemberdayaan perempuan dalam proses perdamaian di Afghanistan. Melalui diplomasi, Indonesia menawarkan pendekatan berbasis komunikasi kultural untuk dapat bekerja sama dan menarik perhatian Afghanistan. Berdasarkan tiga komponen konsep *soft power currency*, Indonesia menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan praktik diplomasi di Afghanistan. Pertama, dalam konsep *beauty*, Indonesia dan

Afghanistan memiliki beberapa kesamaan, yaitu ide, tujuan, penyebab konflik, dan visi. Dengan adanya kesamaan tersebut, Indonesia dapat menjadi *role model* untuk Afghanistan dalam menerapkan kebijakan dan praktik baik dalam pemberdayaan perempuan untuk mendukung proses perdamaian Afghanistan. Kedua, konsep *brilliance*, menunjukkan kemampuan dan keberhasilan Indonesia dalam mendukung program pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Melihat hal ini, Afghanistan dapat mengidentifikasi dan mengadopsi nilai dalam peran perempuan seperti di Indonesia. Ketiga, konsep *benignity*, berupa tindakan positif Indonesia yang turut mendampingi Afghanistan dalam upaya pembangunan perdamaian. Hal ini ditunjukkan dengan dengan pemberian bantuan pengembangan kapasitas dalam bidang kesejahteraan, bantuan pemikiran, dan pendampingan penguatan sumber daya manusia. Diplomasi yang diterapkan oleh Indonesia sesuai dengan ketiga konsep *soft power currency* memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh positif kepada Afghanistan, sehingga Afghanistan dapat menjadikan Indonesia sebagai model dan pembelajaran dalam upaya proses perdamaian. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan komitmen dalam upaya menjaga perdamaian dunia melalui pemberdayaan perempuan.

Referensi

- Bakry, Umar Suryadi. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berridge, G. (2010). *Diplomacy Theory and Practice*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- DeVito, J. A. (2015). *Human communication: The basic course*. Boston: Allyn and Bacon.
- Khurun'in, I. (2016). "Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan." *Jurnal Transformasi Global, Vol. 3, No.1*.
- Marsudi, Retno LP. "Toward long-lasting peace and stability in Afghanistan." *Jakarta Post* 05/06/2020, <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/05/toward-long-lasting-peace-and-stability-in-afghanistan.html> diakses pada tanggal 21 November 2020.
- Mustaqim, A. H. (2020, Maret 10). "Konflik Politik Terus Berlanjut, Pelantikan Presiden Afghanistan Ditunda." Diakses dari <https://international.sindonews.com/berita/1551238/43/konflik-politik-terus-berlanjut-pelantikan-presiden-afghanistan-ditunda> pada 14 September 2020.
- Nashrullah. N. (2019, Juli 24). "Perdamaian di Aceh Bisa Jadi Model Penyelesaian Konflik." Diakses melalui <https://nasional.republika.co.id/berita/pv516m320/perdamaian-di-aceh-bisa-jadi-model-penyelesaian-konflik> pada 14 September 2020.
- Naskah UUD RI 1945
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. United States: Public Affairs.
- Vuving, A. L. (2009). "How Soft Power Works". Paper presented at the panel "Soft Power and Smart Power". American Political Science Association annual meeting. Toronto.
- Waluyo, A. (2017, November). *Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Berharap Peran Indonesia Atasi Konflik di Afghanistan*. Diakses dari www.voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diharapkan-ikut-berperan-atasi-konflik-di-afghanistan/4129788.html> pada September 2020

Bidang Ekonomi

13 JULI 2018
Pengiriman delegasi Business Women of Afghanistan ke Indonesia
Partisipasi Indonesia untuk mengirim Business Women of Afghanistan untuk meningkatkan kemampuan dan kreatifitas para bisnis perempuan pada Workshop di Jakarta

5 JULI 2018
Kunjungan pengusaha dari New Landstar Worldwide Company (NLWC) ke KBRI Kabul
NLWC membawahi pengusaha perempuan Afghanistan dengan berbagai bidang usaha terutama saffron, dried fruits, dan batu permata.

31 JULI 2018
Partisipasi KBRI dalam 2nd International Women's Economic Forum and Exploration of Solution
Dalam Konferensi di Kabul, Afghanistan tersebut dibahas masa depan bagi perempuan Afghanistan, pengusaha perempuan, dan peran pengusaha perempuan dalam pembangunan di Afghanistan.

7 - 9 Mei 2018
Pelatihan Prosedur Ekspor Impor di KBRI Kabul, dihadiri oleh 30 wiraswasta Afghanistan
Meningkatkan peran Indonesia dalam peningkatan kapasitas ekspor nasional, khususnya bagi para pelaku UMKM melalui kerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan PPEI, Direktur Jenderal PEN, dan Kementerian Perdagangan RI.

22 JULI 2018
Kunjungan KBRI ke Industri Rumah Tangga, di Karez Mar, Kabul
Terdiri dari 50 perempuan, berupaya meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi supaya lebih mandiri, kreatif, dan profesional dengan produk andalan Rose Oil, sabun tangan, bahan perawatan kulit, dan minyak wangi.

18 SEPTEMBER 2018
Pengembangan kerja sama dengan Zan (Woman) TV Afghanistan
KBRI mengundang CEO Zan TV untuk ikut dalam kegiatan TEI 2018 bersama dengan jaringan pengusaha perempuan.

Bidang Ekonomi

12 MARET 2017
Pembentukan Afghanistan Women Chamber of Commerce and Industries (AWCCI).
Diresmikan oleh Ibu Negara Republik Afghanistan, Rula Ghani, AWCCI menekankan pentingnya mempromosikan hasil karya atau kerajinan tangan perempuan Afghanistan kepada komunitas internasional. Sekitar 850 perempuan menjadi anggota AWCCI dari seluruh provinsi Afghanistan.

15 MEI 2017
Afghan Women Messenger of Peace (AWMP)
Partisipasi Indonesia dalam Konferensi Wanita Afghanistan tentang Peran Wiraswasta Perempuan Afghanistan di Istana Presiden.

Perdamaian

15-16 MEI 2017
Kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPA) Menteri PPPA Indonesia, Yohana Yembise menjadi keynote speaker dalam Symposium on the Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace, di Kabul, Afghanistan memenuhi undangan Ibu Rula Ghani.

4 SEPTEMBER 2017
Kunjungan Ibu Rula Ghani ke Indonesia
Kunjungan ini menunjukkan komitmen Afghanistan untuk terus meningkatkan hubungan maupun kerja sama kedua negara, termasuk para pemimpin agama dan aliansi perempuan.

6 NOVEMBER 2017
Kunjungan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi ke Afghanistan
Dalam kunjungan tersebut, Afghanistan mengharapkan kesiediaan dan keseriusan Indonesia dalam membangun perdamaian di Afghanistan.

2018

2017

Bidang Pendidikan

29 JANUARI 2018
Kunjungan Keneagaraan Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara ke Afghanistan
Presiden RI Joko Widodo mengumumkan akan memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Afghanistan.

24 SEPTEMBER 2018
Partisipasi Indonesia dalam Academic Symposium "Gender, Beyond the Limits" di American University of Afghanistan (AUAF) di Kabul, Afghanistan
Bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai "Gender", "Women Empowerment" dan "Violence Against Women". Membuka kesempatan bagi akademisi, peneliti, ahli kebijakan publik, dan lembaga masyarakat untuk dapat mengakses penelitian-penelitian terkait dengan gender di Afghanistan.

Bidang Keagamaan

11-12 AGUSTUS 2018
Kehadiran para perempuan di Annual Nahdatul Ulama Afghanistan Conference (Role of Ulama In Durable Peace, Development and Economy) di Kabul
Dihadiri oleh 100 ulama (70 pria dan 30 wanita), anggota NUJ Shura dari Kabul dan provinsi lainnya, perwakilan dari KBRI, kelompok media, otoritas pemerintah dan anggota departemen keamanan. Para ulama menunjukkan dukungan penuh mereka terhadap prakarsa ini dan menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Pemerintah Afghanistan dan organisasi serupa untuk perdamaian, rekonsiliasi, dan pembangunan.

1 SEPTEMBER-13 DESEMBER 2018
Pengiriman Pelajar Perempuan dalam acara Short Course on Introduction to Islam in Indonesia
Program pendalaman agama Islam ini diberikan kepada 80 orang generasi muda Afghanistan untuk belajar di Pondok Pesantren Tazakka di Batang, Jawa Tengah dan Darul Ulum, Sukabumi, Jawa Barat. MUI Pemerintah Indonesia memberikan beasiswa untuk belajar mengenai kebudayaan, kerukunan, keberagaman, toleransi beragama, hidup rukun dan damai dalam multikulturalisme.

Perdamaian

28 FEBRUARI - 1 MARET 2018
Kunjungan Kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Kabul, Afghanistan dalam Konferensi Perdamaian Kabul Proses II
Dalam konferensi tersebut, Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia akan berbagi praktik baik dan pelajaran Indonesia dalam menangani konflik internalnya melalui pendekatan soft power.

2018

Bidang Pendidikan

30 MARET - 3 APRIL 2019
Pertemuan Utusan Khusus Wakil Presiden RI, Hamid Awaluddin dengan Menteri Pertambangan Afghanistan, Nargis Nehan
Indonesia berkomitmen dan siap untuk memberikan pelatihan di bidang Migas bagi 105 peserta termasuk peserta perempuan asal Afghanistan yang dimulai pada Juni 2019.

JUNI 2019
Pengiriman staff perempuan Kementerian Pertambangan dalam acara Short Course on Mining di Indonesia
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang dilanjutkan dengan kerja sama investasi.

27-30 NOVEMBER 2019
Dialogue on the Role of Women in Building and Sustaining Peace, Women as Agent of Peace and Prosperity
Terdiri dari program peningkatan kapasitas di bidang kesehatan ibu dan anak, pendidikan dan pengembangan usaha, serta konsultasi. Terdapat dialog dengan DPR RI, Komnas Perempuan, Pengusaha Muslimah Indonesia, dan KPPIA.

Bidang Ekonomi

4 FEBRUARI 2019
Partisipasi Indonesia dalam Pertemuan Komite Eksekutif Pemberdayaan Wanita ke-7 di Kantor CEO Afghanistan
Topik pembahasan yaitu menciptakan lapangan kerja bagi perempuan pedesaan dan meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian.

25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2019
Mengadakan Women Dialogue untuk Perempuan Afghanistan

Perdamaian

15 MEI 2019
Partisipasi Indonesia dalam Afghanistan Women's National Consensus for Peace
Dikeuai oleh Ibu Negara, Rula Ghani, menyampaikan laporan hasil Konsensus Nasional Wanita Perdamaian Afghanistan, yang dihadiri oleh 3000 wanita Afghanistan dari berbagai provinsi.

2 JULI 2019
Pertemuan Duta Besar RI untuk Afghanistan, Arief Rachman MD dengan Wakil Gubernur Provinsi Kabul, Herat dan Nangharhar
Topik utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah: 1) Peran perempuan dalam perkembangan dan kemajuan Indonesia; 2) Peran aktif perempuan Muslim di negara-negara Muslim; 3) Peran perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian.

Bidang Keagamaan

2019
Kehadiran para perempuan di Annual Nahdatul Ulama Afghanistan Conference (Role of Ulama In Durable Peace, Development and Economy) di Kabul

2019

Demokrasi

30 MARET - 3 APRIL 2019
Pertemuan Utusan Khusus Wakil Presiden RI, dengan IEC (Independent Election Commission) dan IECC (Independent Electoral Complaints Commission)
Dukungan dalam meningkatkan kapasitas di bidang Pemilu.

15-18 APRIL 2019
Kunjungan Delegasi IEC dan IECC Afghanistan ke Indonesia
Delegasi turut serta dalam program Election Visit Program yang diselenggarakan oleh KPU Indonesia. Dihadiri oleh 40 orang, yang terdiri dari 13 KPU, ratusan pemantau dari Kedutaan Besar Negara-Negara Asing di Indonesia, INGO, dan NGO, serta media massa asing dan nasional.

Perdamaian

1 MARET 2020
Peresmian dan Pembentukan Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network (AISWN) di Kabul, Afghanistan oleh Menlu RI Retno Marsudi & Penerimaan medali kehormatan 'Malalai' kepada Menlu RI Retno Marsudi oleh Presiden Asraf Ghani.
Menlu RI juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Urusan Perempuan Afghanistan, Delbar Nazari dan Menteri Informasi dan Kebudayaan, Hasina Saifi. AISWN menjadi bukti peningkatan hubungan bilateral Afghanistan dan Indonesia serta implementasi komitmen Indonesia dalam bentuk pemberdayaan perempuan Afghanistan.

31 AGUSTUS 2020
Pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2020 terkait Women in Peacekeeping Operations
Indonesia telah mengusulkan perpanjangan waktu operasi UNAMA (Misi PBB di Afghanistan) yaitu selama 1 tahun.

2 MARET 2020
KBRI Kabul menjadi tuan rumah peringatan Hari Perempuan Internasional
Duta Besar Dr. Arief Rachman MD menunjukkan bahwa perempuan adalah pilar suatu bangsa dan perempuan dapat memainkan peran penting untuk membantu suatu negara maju.

12 SEPTEMBER 2020
Kehadiran Menlu RI Retno Marsudi dalam acara Intra Afghanistan di Doha
Menlu RI Retno Marsudi menyatakan bahwa, Indonesia memberikan dukungan penuh dalam keberlangsungan proses perdamaian Afghanistan dan tetap berkomitmen dalam peningkatan pemberdayaan perempuan Afghanistan.

Bidang Keagamaan

2 OKTOBER 2020
Ulama Wanita Indonesia bersama Afghan Woman Organization for Peace and Freedom (AWPFO) menyelenggarakan The First National Afghan Women Conference on Peace
1) Meminta adanya gencatan senjata; 2) Ulama laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya mengurangi rasa kebencian dan permusuhan, serta kesetaraan dalam isu gender. Peran NU dan Ulama Indonesia dijadikan model bagi kelompok perempuan Afghanistan dalam menciptakan kerukunan dan memulihkan perdamaian di dalam masyarakat.

2020
Kehadiran para perempuan di Annual Nahdatul Ulama Afghanistan Conference (Role of Ulama In Durable Peace, Development and Economy) di Kabul

2019

2020

Sumber: KBRI Indonesia di Afghanistan

